



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**DINAS PERIKANAN**

# **LAPORAN KINERJA** | **2019**



JL. ANTASARI NO. 06 PUTUSSIBAU  
TELP/ FAX. (0567) 21644 - KODEPOS 78711

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban tahunan terhadap semua pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan. Selain itu Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati Kapuas Hulu dan sebagai alat umpan balik (*feed back*) untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan ke depan.

Kami menyadari LKIP yang disusun ini, belum secara sempurna menggambarkan kinerja yang ideal, namun kami terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, namun pengembangan dan penyempurnaan LKIP ini memang memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Akhirnya, kami berharap melalui LKIP ini Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dapat mengambil peran dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan "*Good Governance*" di lingkungan internal khususnya dan Pemerintah Kabupaten pada umumnya.

Putussibau, 15 Februari 2020

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Kapuas Hulu,



RONI JANUARDI, S. Sos., M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650129 198603 1 009

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 melaporkan capaian kinerja (*performance result*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*). Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019, Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan kegiatan untuk memacu program prioritas dalam pembangunan perikanan, untuk menyusun laporan kinerja diperlukan suatu sistem yaitu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari indikator serta mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Dalam manajemen modern pelaporan merupakan fase terakhir yang dijadikan alat untuk evaluasi diri sendiri guna perbaikan. Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggung jawab tertentu berdasarkan pendelegasian kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas itu. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini akan dimanfaatkan oleh pemberi mandat sebagai bahan evaluasi dan oleh manajemen Dinas Perikanan akan digunakan sebagai salah satu pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam mewujudkan masyarakat perikanan yang tangguh, maju dan mandiri serta bertanggung jawab dalam iklim usaha yang kondusif di era globalisasi.

Masyarakat umum menghendaki agar pemerintah menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja yang baik, tertib dan teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disisi lain setiap instansi dituntut untuk melakukan perbaikan terus menerus dan berkesinambungan sehingga pemerintah benar-benar menjalankan praktek-praktek yang sehat, ekonomis, efisien, efektif, produktif, demokratis, adil, bertanggung jawab, transparan dan tanggap terhadap perubahan.

Dengan berorientasi kepada Rencana Strategis tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018, maka dalam tercapainya visi, misi dan sasaran serta menjalankan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan 11 (Sebelas) Program pembangunan yang meliputi 55 (Lima Puluh Lima) kegiatan. beberapa program yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan di tahun 2019, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 20 kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 2 kegiatan;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan 1 kegiatan;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 9 kegiatan;
5. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dengan 5 kegiatan;
6. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dengan 2 kegiatan;
7. Program Peningkatan Produksi Benih dan Pakan Ikan UPR/UP2R dan Pembudidaya dengan 1 kegiatan;
8. Program Pengembangan dan Pengelolaan UPT Benih Ikan Kelansin dengan 3 kegiatan;

9. Program Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah dengan 3 Kegiatan;
10. Program Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dengan 4 Kegiatan;
11. Program Pelestarian dan Pengendalian Pengelolaan Perairan Umum Daratan dengan 4 kegiatan.

Guna membiayai pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu didukung dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 sebesar Rp. 14.737.053.400,- dimana pada akhir Desember 2019 Anggaran yang terealisasi sebesar Rp 14.371.627.682 atau sebesar 97.52 %

Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2019 menetapkan target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perikanan sebesar Rp. 255.000.000,- terdiri dari UPT BI Kelansin sebesar Rp. 150.000.000; dan TPI sebesar Rp. 105.000.000;. Adapun realisasi penerimaan yang dicapai hingga Desember 2019 sebesar Rp. 231.696.750; ( UPT BI Rp.150.140.000 dan TPI sebesar Rp. 81.556.750; ) atau 90,86 % dari target PAD yang ditetapkan.

Unit Pelaksana Teknis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu yaitu: Balai Benih Ikan Kelansin dan Tempat Pelelangan Ikan yang berada di 7 (Tujuh) TPI yaitu, TPI Putussibau, Jongkong, Silat Hilir, Badau, Lanjak, Selimbau, dan Suhaid.

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar dengan beraneka jenis sumberdaya perikanan yang bernilai ekonomis tinggi. Dari aspek ekonomi, kawasan danau sentarum dan sekitarnya memiliki kontribusi yang cukup signifikan, baik bagi masyarakat setempat maupun daerah sekitarnya terutama dari produksi ikan air tawar. Didaerah Danau Sentarum dan sekitarnya penduduk melakukan kegiatan perikanan terbanyak adalah penangkapan dan setelah itu budidaya terutama ikan Toman dan ikan Betutu. Potensi ikan di areal danau Sentarum sebenarnya sangat tinggi tetapi akibat meningkatnya jumlah penduduk dan mata pencaharian utama adalahmenangkap ikan maka populasi ikan di Danau Sentarum semakin lama semakin berkurang jumlahnya. Kalau tidak ada upaya yang signifikan maka dikhawatirkan dimasa datang akan terjadi kepunahan berbagai jenis ikan yang selama ini menjadi harapan penduduk sebagai mata pencahariannya.

Dibidang pelayanan administrasi pemerintahan dan teknis menunjukkan keberhasilan yang cukup baik, hal ini bisa dilihat dari tingkat pendidikan pegawai pada lingkungan Dinas Perikanan sudah banyak yang berpendidikan minimal S1 dan S2, begitu pula fasilitas kantor sudah memenuhi kelayakan kantor dengan telah ditempatinya gedung kantor Dinas Perikanan yang baru, namun tidak hanya cukup sampai disini saja peningkatan kapasitas aparatur masih terus ditingkatkan guna menunjang kinerja Dinas Perikanan.

Pada akhirnya Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu sudah menetapkan tujuan dan sasaran Dinas tahun 2016 -2021 diharapkan dapat dicapai melalui program dan kegiatan Dinas Perikanan.

Dari hasil pengukuran indikator kinerja sasaran, maka pencapaian kinerja pada tahun 2019 dapat dikategorikan sebagai berikut :

No	Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Jumlah Indikator
1	Diatas 85	4
2	70 s/d kurang dari 85	0
3	55 s/d kurang dari 70	0
4	Kurang dari 55	0
Jumlah		4

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, maka Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu,
- 2). Meningkatkan sarana dan prasarana yang masih belum memadai untuk kelancaran kegiatan rutin,
- 3). Menambah anggaran yang dialokasikan ke Dinas Perikanan untuk kelancaran tugas.

Namun demikian capaian tersebut diatas dirasabelum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi selama tahun 2019. Namun setiap tahun capaian-capaian tersebut akan terus dibenahi dengan berkerja secara optimal dan efisien. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan Akuntabilitas Publik dalam rangka mewujudkan "*Good Governance*" dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I	PENDAHULUAN
A.	GAMBARAN UMUM
1.	Pendahuluan
2.	Susunan Organisasi
3.	Sumber Daya Aparatur
4.	Sumber Daya Keuangan
5.	Sarana dan Prasarana
B.	PERMASALAHAN UTAMA ( <i>Strategis Issued</i> )
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
A.	Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021
B.	Perjanjian Kinerja Tahun 2019
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
A.	Capaian Kinerja Organisasi
B.	Realisasi Anggaran
BAB IV	PENUTUP
A.	Kesimpulan
B.	Hambatan dan Upaya Pemecahan Masalah

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	: STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU	37
LAMPIRAN 2	: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	38
LAMPIRAN 3	: GALERI KEGIATAN TAHUN 2019	39
LAMPIRAN 4	: HASIL PENGUKURAN KINERJA 2019	40

## BAB I.

### PENDAHULUAN

#### A. GAMBARAN UMUM

##### 1. Pendahuluan

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Dalam pelayanan di sektor Perikanan berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dirinci berdasarkan UU, PP, Perda, Kepmen. Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul. Kemudian Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Tahun 2018 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Dinas Perikanan adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun

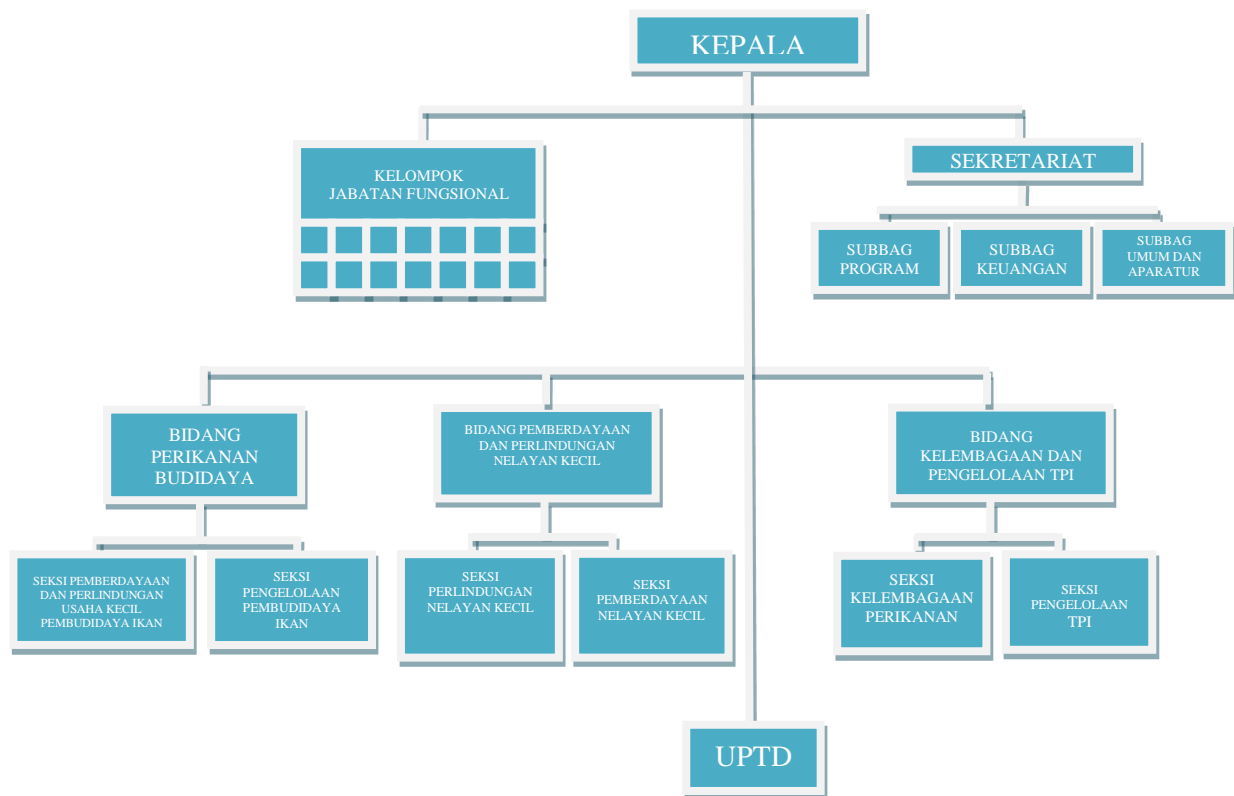


Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian mendapat perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tanggal 7 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Bidang Perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Susunan Organisasi

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perikanan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang Perikanan, Pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya, penyampaian laporan secara periodik serta melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tupoksinya.



### 3. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019, Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan perikanan, maka Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 82 (Delapan Puluh Dua) Orang pegawai ( data sampai dengan Desember 2019) dengan komposisi sebagai berikut :

#### a. Pegawai Negeri Sipil/ CPNS dengan jumlah 33 orang.

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG				DIKLATPIM	
		S2	S1/ D4	D3	SLTA	SD/ SLTP	I	II	III	IV	SUDAH	BELUM
1	II	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2	III	3	1	-	-	-	-	-	3	1	1	3
3	IV	5	3	-	2	-	-	-	9	1	6	3
	SUB JUMLAH	10	4	0		0	0	0	11	3	10	0
4	FUNGSIONAL		5	2	8	2	2	4	11	-	-	-
	TOTAL	10	9	2	1	2	2	4	21	3	-	-

b. Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak

Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dibantu oleh Pegawai tidak Tetap/Tenaga Kontrak yang berjumlah 49 Orang Terdiri dari; Tenaga Administrasi Perkantoran 20 Orang, Petugas Pengamanan Kantor 2 Orang, Petugas Kebersihan Kantor 2 Orang, Supir/Motoris 1 Orang, Petugas BBI 13 Orang, Petugas TPI 10 Orang, Petugas Biota Langka 1 Orang, dan Penyuluh Perikanan Bantu 2 Orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- SARJANA (S1/D3) : 21 Orang
- S L T A : 25 Orang

4. Sumber Daya Keuangan

Sumber Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2019, bersumber dari dana APBD Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dengan total dana sebesar Rp.17.861.534.400 (*Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Sumber Dana Dinas Perikanan Tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran
1	Belanja Tidak Langsung	3.124.481.000,00
	Belanja Pegawai	3.124.481.000,00
2	Belanja Langsung	14.737.053.400,00
	Belanja Pegawai	1.262.045.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	11.328.053.400,00
	Belanja Modal	2.146.955.000,00
	Jumlah	17.861.534.400,00

5. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2  
Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan sampai dengan TA.2019

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
1	Tanah	5	5			
2	Instalasi PDAM/ PLN/ Telp./Jaringan	8	8			
3	Bangunan :					
	a. Gedung Kantor	9	9			
	b. Rumah Dinas	0	0			
	c. Rumah Tamu (Guest House)	1	1			
	d. Mess, Pos Penyuluh Perikanan, dll	9	9			
	e. Pagar Halaman Kantor	1	1			
	f. Rumah Packing	1	1			
	g. Pagar Keliling Instalasi Kolam	1	1			
4	Alat-alat Besar :					
5	Alat Angkut :					
	a. Mobil	5	5			
	b. Sepeda Motor	37	37			
	c. Speed Boat	6	6			
6	Alat Perikanan :					
	a. Tabung Oksigen	6	6			
	b. Tag Reader	1	1			
	c. Mesin pencetak pelet	2	2			
	d. Fry counter	1	1			
	e. Mesin Pencetak Pakan	1	1			
	f. Aquarium/ Wadah Benih	78	78			
	g. Pompa Air	7	7			
	h. DO Meter	2	2			
	i. Kantong Plastik Ikan	54	54			
	j. pH Tester	8	1	7		
	k. pH meter	1	1			
7	Peralatan Meubelair :					
	a. Meja kerja	66	66			
	b. Meja Rapat (Kecil/ Besar)	10	10			
	c. Meja/ Kursi Tamu	1	1			
	d. Kursi Rapat/ Kursi Kerja	40	40			
	e. Whiteboard/ Papan tulis	4	4			
	f. Rak Buku Perpustakaan	14	14			
	g. Lemari arsip	10	10			
8	Peralatan Kantor :					
	a. Komputer	2	2			
	b. Laptop	47	47			
	c. Hardisk Eksternal	4	4			

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
	d. Proyektor	3	3			
	e. Printer	4	4			
	f. Alat Pendingin (AC)	52	52			
	g. Kipas Angin	14	13	1		
	h. Brankas	11	11			
	i. Mesin Fotocopy	1	1			
		2	1	1		
9	Alat-alat Studio					
	a. Kamera Digital + Asesoris	14	14			
	b. Handycam	1	1			
	c. CCTV	19	19			
	d. Solar Home System	1	1			
	e. Roll Banner	10	10			
10	Alat ukur	1	1			
	a. GPS	7	7			

#### B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIS ISSUED*)

Adapun isu strategis dan permasalahan utama yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjalankan fungsinya adalah sebagai berikut.

1. Rendahnya pendapatan nelayan tangkap di sektor hulu;
2. Rendahnya Pendapatan Pembudidaya di sektor hulu;
3. Rendahnya pendapatan Pelaku Usaha Perikanan di sektor Hilir (Pengumpul, Distributor, Jasa Angkutan/Logistik Ikan, Pengolah/ Pedagang ikan dan Pengolah Hasil Perikanan;
4. Rendahnya kontribusi UPR/ Pokdakan dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat dan komunitas;
5. Belum optimalnya kontribusi Balai Benih Dinas dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat dan komunitas;
6. Rendahnya jaminan Ketersediaan pasokan ikan yang berkualitas, stabil dan hanya terjangkau pada tingkat konsumen (Rumah tangga dan unit Pengolah Hasil Ikan);
7. Berkurang bahkan menghilangnya beberapa jenis ikan endemic kualitas ekspor dana tau bernilai ekonomis tinggi, seperti ikan Arwana, Ringau, Belida dan lain-lain dari PUD.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 s.d 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin terjadi. Disamping itu RENSTRA juga memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta kebijakan, program yang realitas dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Agar Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan sektor Perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu kedepan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Kantor Perikanan saja, melainkan juga unsur Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Kapuas Hulu, dan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2018 merupakan implementasi Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu periode tahun 2016 – 2021, yang merupakan tolak ukur pelaporan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.

#### 1. Visi

Dengan memperhatikan arah Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di atas, maka Visi Pemerintah Kabupaten Hulu tahun 2016–2021 adalah:

**"MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN HARMONIS"**

Visi tersebut mengandung beberapa makna sebagai berikut:

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Kapuas Hulu yang Sejahtera, mengandung arti suatu kondisi keadaan masyarakat Kapuas Hulu yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin terpenuhi dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman, dan damai.
2. Kapuas Hulu yang Berdaya Saing, mengandung arti dimana perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
3. Kapuas Hulu yang Harmonis, mengandung arti kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung dengan rukun, damai, taat dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan dinamis.

## 2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Dengan adanya misi, diharapkan seluruh aparat dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui tugas, fungsi, peran, program kerja Dinas Perikanan serta hasil yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Proses perumusan misi tersebut harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan kondisi serta tuntutan lingkungan.

Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi acuan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai Visi adalah sebagai berikut :

**"MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN"**

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta Meningkatkan Keluarga Berencana, kesejahteraan sosial, Perlindungan perempuan dan anak. Potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi: Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan Perikanan yang merupakan mata pencaharian sekitar 80 % rakyat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.



### 3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan-tujuan dan sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*).

#### Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun). Perumusan tujuan strategis ini dimaksudkan agar Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan stakeholders, Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada misi ke-2 berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Matrik Misi dan Tujuan RPJMD 2016 - 2021

Misi		Tujuan		Indikator	
2	Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah yang Berkelanjutan	2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan	2	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)

#### Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, spesifik yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan Bidang-bidang yang terkait di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.



Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai. Sasaran-sasaran pembangunan 5 tahun Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Matrik Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan 2016 - 2021

Tujuan Dinas Perikanan				Sasaran Dinas Perikanan			
Uraian		Indikator		Uraian		Indikator	
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan Dinas	1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabel Kinerja Dinas	1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
2	Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan pengolah	1	Rata – rata pendapatan nelayan	1	Meningkatnya pendapatan nelayan	1	Persentase nelayan yang meningkat pendapatannya
		2	Rata – rata pendapatan pembudidaya	2	Meningkatnya pendapatan pembudidaya	2	Persentase pembudidaya yang meningkat pendapatannya
		3	Rata – rata pendapatan pengolah	3	Meningkatnya pendapatan pada pengolah hasil perikanan dan pelaku hilirisasi produk perikanan	3	Persentase pengolah yang meningkat pendapatannya

Secara terinci, target Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan perikanan yang akan dicapai tahun 2016-2021 sebagaimana tersebut pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3  
Indikator Kinerja Utama & Indikator Kinerja Lainnya Dinas Perikanan T.A 2016 - 2021

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	C	C	B	B	BB	BB	BB
2	Persentase nelayan yang meningkat pendapatannya	7	7	8	8,5	10	15	15
3	Persentase pembudidaya yang meningkat pendapatannya	5	5	7	10	15	20	20
4	Persentase pengolah yang meningkat pendapatannya	1	1	2	3	4	5	5

#### A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen kesepakatan kinerja antara Bupati Kabupaten Kapuas Hulu selaku atas dengan para Kepala SKPD selaku bawahan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut mengikat dan merupakan ukuran kinerja keberhasilan kepala SKPD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi masing –masing. Adapun perjanjian kinerja Kepala OPD tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kepala OPD Dinas Perikanan Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitabel kinerja Dinas	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B
3	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Persentase nelayan yang meningkat pendapatannya	8,5 %
4	Meningkatnya Pendapatan Pembudidaya	Persentase pembudidaya yang meningkat pendapatannya	10 %
5	Meningkatnya pendapatan para pengolah	Persentase pengolah yang meningkat pendapatannya	3 %

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1,833,926,600.00	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 162,350,000.00	APBD
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 98,015,640.00	APBD
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 547,347,660.00	APBD
5	Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Rp 1,820,838,000.00	APBD (DAK)
6	Pengembangan dan Peningkatan Prodksi Perikanan Budidaya	Rp 5,498,626,000.00	APBD (DAK)
7	Peningkatan Produksi Benih dan Pakan Ikan UPR/UP2R dan Pembudidaya	Rp 160,770,500.00	APBD
8	Pembangunan dan Pengelolaan UPT Balai Ikan Kelansin	Rp 1.310,872,000.00	APBD
9	Penguatan Sistem Logistik Ikan Daerah (SLID)	Rp 2,174,908,000.00	APBD
10	Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Rp 674,544,000.00	APBD
11	Pelestarian dan Pengendalian Perairan Umum Daratan (PUD)	Rp 454,855,000.00	APBD
	JUMLAH	Rp 14,737,053,400.00	

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

##### 1. Pengukuran Kinerja

###### a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Realisasi}) - \text{Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta

indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran sebagai berikut :

- a. 85 s/d 100 ► Sangat Berhasil
- b.  $70 \leq X < 85$  ► Berhasil
- c.  $55 \leq X < 70$  ► Cukup Berhasil
- d.  $< 55$  ► Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcomes*). Sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya terbangun. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 per sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Pengukuran Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitabel kinerja Dinas	1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
2	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	1 Persentase nelayan yang meningkat pendapatannya	8,5 %	10,93 %	128,59 %
3	Meningkatnya Pendapatan Pembudidaya	1 Persentase pembudidaya yang meningkat pendapatannya	10 %	10,72 %	107,2 %

4	Meningkatnya pendapatan para pengolah	1	Persentase pengolahan yang meningkat pendapatannya	3 %	19,07 %	635,67 %
Rata – rata Capaian Kinerja						242,86 %

Dari 4 sasaran Pejanjian Kinerja Tahun 2019 sebanyak 4 (empat) sasaran dalam kategori Sangat Berhasil.

Pencapaian kinerja indikator sasaran dari 4 sasaran dan 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Indikator sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perikanan

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	Sangat Berhasil	4	100%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum ada nilai	-	-

## 2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Akuntabilitabel Kinerja Dinas

Sasaran "*Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitabel kinerja Dinas*" bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan anggaran serta peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Adapun nilai (skor) akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan evaluasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyelenggaraan SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Capaian Kinerja sasaran "*meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan*" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran  
Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitabel Kinerja Dinas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat	B	B	100 %
Capaian Kinerja sasaran Berhasil (100%)					

Tabel 3.4

Analisis Pencapaian Sasaran  
Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	CC	C	50	B	C	98,34	B	B	100

Tabel 3.5

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran  
Dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2019	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	B	75

Penyelenggaraan SAKIP Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 berdasarkan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi mendapat Predikat "B". Realisasi kinerja Tahun 2019 mencapai target yang ditetapkan yaitu Predikat "B" dengan capaian kinerja sebesar 100 % Realisasi kinerja indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang mendapat predikat "B" Jika dibandingkan Tahun 2018, maka predikat SAKIP Dinas Perikanan mengalami perubahan peningkatan kinerja dari capaian sebelumnya yaitu "C". Hal ini juga sama halnya Realisasi kinerja indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2019 yang mendapat predikat "B" Jika dibandingkan Tahun 2016 mengalami perubahan yakni pada predikat "C".

Realisasi kinerja Tahun 2019 yang mendapat predikat "B" jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Perikanan 2016 - 2021 dengan predikat "BB", maka tingkat kemajuan indikator kinerja Nilai



(skor) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah mencapai 75%. Keberhasilan Pencapaian kinerja indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan merupakan bentuk tanggung jawab OPD Dinas Perikanan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih bersih dan profesional dengan mewujudkan target indikator yang berorientasi hasil.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja OPD Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan reviu Rencana Strategis RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 dan Renja OPD tahun 2019;
2. Inten melakukan koordinasi dengan OPD terkait yang membindangi dokumen perencanaan dan SAKIP seperti Inspektorat, Ortal dan Bappeda dalam rangka review, revisi, sinkronisasi dan harmonisasi terhadap dokumen dan perencanaan dan evaluasi SAKIP
3. Penyusunan Cascading, Rencana Aksi serta Rencana Kerja Tahunan Bidang masing - masing;
4. Melakukan evaluasi internal secara berkala yakni tiga bulan sekali serta melakukan evaluasi terhadap kinerja yang kurang baik;
5. Melakukan inovasi peningkatan kinerja Dinas Perikanan ;

Pencapaian Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah tentunya masih terdapat beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa kendala tersebut antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas perencanaan strategis meliputi Renstra, Rencana Kerja, Cascading dan Rencana Aksi Dinas Perikanan;
2. Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah belum berorientasi hasil (Outcome);
3. Capaian program belum selaras dengan IKU Kepala Dinas :
4. Cascading kinerja yang merupakan kinerja turunan dari pejabat di atasnya belum sinkron dengan kegiatan yang dilakukan;
5. Masih kurangnya data dan informasi pendukung sebagai dasar penyusunan pelaporan kinerja serta tindak lanjut permasalahan yang dilaporkan;
6. Masih terdapatnya kegiatan-kegiatan yang tidak berorientasi kepada pencapaian sasaran strategis;
7. Masih terdapatnya sub kegiatan atau belanja yang kurang berimplementasi kegiatan dan program;
8. Masih lemahnya pendokumentasian hasil kegiatan baik berupa data maupun dokumentasi foto dan video;

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan SAKIP di Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan revidi kembali terhadap dokumen-dokumen perencanaan Renstra Dinas Perikanan, Rencana Kerja tahunan, Cascading, Rencana Aksi, RKA dengan indikator yang akan dicapai masing – masing program dan kegiatan;
2. Penyusunan dan revisi dokumen perencanaan yang tepat waktu;
3. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam sistim penganggaran;
4. Melakukan evaluasi internal secara berkala yakni tiga bulan sekali serta melakukan evaluasi terhadap kinerja yang kurang baik;
5. Melakukan inovasi peningkatan kinerja Dinas Perikanan ;
6. Melakukan reward (penghargaan) dan phunishment (sanksi) terhadap kinerja pegawai;

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitabel Kinerja Dinas antara lain sebagai berikut :

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 1 Antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- a. Penyediaan Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- e. Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
- f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
- j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- k. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
- l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- m. Penyediaan Makanan dan Minuman
- n. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- o. Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam
- p. Penyediaan Adminitrasi Pengadaan Barang dan Jasa
- q. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan OPD
- r. Penyusunan RKA dan DPA
- s. Penyediaan Jasa Pendukung Kantor



- t. Penyediaan Jasa Publikasi
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
Kegiatan :
  - a. Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor
  - b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Kegiatan :
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Kegiatan :
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ;
  - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun ;
  - c. Penyusunan Jurnal dan Buku Besar Dinas Perikanan ;
  - d. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ;
  - e. Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD ;
  - f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perikanan ;
  - g. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD dan
  - h. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pendapatan Nelayan

Sasaran "*Meningkatnya Pendapatan Nelayan*" bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun cara mengukur prosentase nelayan yang meningkat pendapatannya dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah nelayan yang meningkat pendapatannya}}{\text{Jumlah nelayan keseluruhan}} \times 100\%$$

Untuk mengukur "*Meningkatnya Pendapatan Nelayan* ", maka dilakukan survey oleh tim One Data Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu kepada sampel nelayan. Metode tersebut dilakukan dengan metode sampel pada lokasi berdasarkan zona yang sudah ditentukan yakni zona selatan, utara dan Kapuas. Jumlah sampel yang berhasil dari hasil survey yakni sebanyak 1.330 RTP (Rumah Tangga Perikanan) dari total 5.910 RTP sesuai data Validasi Nasional (VALNAS) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Sehingga didapatkan rata – rata pendapatan nelayan sebesar Rp. 1.557.981,00. Dari data

nelayan yang survey 1.330 RTP tersebut maka dapat disimpulkan jumlah nelayan yang meningkat pendapatannya diatas rata –rata sebanyak 646 orang/ RTP.

$$\frac{646 \text{ orang}}{5.910 \text{ orang}} \times 100\% = 10,93 \%$$

Maka persentase nelayan yang meningkat pendapatannya adalah jumlah nelayan yang meningkat pendapatannya (646 orang) dibagi jumlah keseluruhan nelayan (5.910 orang) dikalikan 100 persen adalah 10,93 %.

Tabel 3.6  
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran  
Meningkatnya Pendapatan Nelayan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase nelayan yang meningkat pendapatannya	Persen	8,5	10,93	128,59 %
Capaian Kinerja sasaran Sangat Berhasil (128,59 %)					

Tabel 3.7  
Analisis Pencapaian Sasaran  
Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase nelayan yang meningkat pendapatannya	7	7	100	8	8	100	8,5	10,93	128,59

Tabel 3.8  
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran  
Dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2019	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Persentase nelayan yang meningkat pendapatannya	15	10,93	72,87 %

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pendapatan Nelayan Tahun 2019 sebesar 10,93 % dikategorikan "Sangat berhasil".

Realisasi kinerja Meningkatnya Pendapatan Nelayan Tahun 2019 mencapai 10,93 % atau sebesar 128.59%. Realisasi kinerja tahun 2019 tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 8,5 %.

Realisasi kinerja indikator persentase nelayan yang meningkat pendapatannya tahun 2019 sebesar 10,93 % jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 15 %, maka tingkat kemajuan indikator kinerja persentase nelayan yang meningkat pendapatannya tahun 2019 mencapai 72,87 %.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase nelayan yang meningkat pendapatannya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemulihan SDI melalui kegiatan restocking
2. Peningkatan produksi tangkap melalui kegiatan *Culture Based Fisheris* (CBF)
3. Pelestarian SDI melalui penetapan Danau Lindung/ suaka perikanan
4. Keterlibatan POKMASWAS dalam pengawasan SDI dan kegiatan patroli pengawasan
5. Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan kegiatan patrol pengawasan
6. Pengaturan perundang – undangan dan kearifan lokal (hukum adat) dalam pengelolaan perikanan tangkap

Pencapaian persentase nelayan yang meningkat pendapatannya tentunya masih terdapat beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa kendala tersebut antara lain :

1. Ketersediaan benih ikan endemik untuk kegiatan restocking masih terbatas, baik kualitas maupun kuantitas
2. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasn SDI belum optimal
3. Terjadinya fluktuasi debit air dan pendangkalan di beberapa periaran sungai dan danau
4. Jumlah danau yang ditetapkan sebagai kawasan lindung/ suaka perikanan masih sedikit
5. Pengelolaan SDI belum sepenuhnya didukung Ketersediaan data dan informasi yang akurat

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mendukung persentase nelayan yang meningkat pendapatannya Kabupaten Kapuas Hulu di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Kegiatan Domestikasi ikan endemik dan meningkatkan peran BBI dalam memproduksi benih ikan endemik,
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDI melalui Pokmaswas,
3. Melaksanakan kegiatan pelestarian SDI melalui penetapan danau sebagai kawasan suaka perikanan/ danau lindung
4. Meningkatkan kegiatan restocking dan CBF

## 5. Pengembangan data dan informasi SDI

Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran 2 Meningkatnya Pendapatan Nelayan antara lain :

### 1. Peningkatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Kegiatan :

- a. Pemulihan Sumber Daya Ikan
- b. Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Kecil
- c. Pengelolaan Perikanan Tangkap Berbasis Budidaya (Cultured Base Fisheries- CBF)
- d. Peningkatan Sarana dan Prasarana usaha perikanan tangkap

### 2. Program Pelestarian dan Pengendalian Pengelolaan Perairan Umum Daratan (PUD)

Kegiatan :

- a. Perlindungan Nelayan Kecil
- b. Domestikasi, penangkaran, dan budidaya spesies ikan endemik Berpotensi langka/punah
- c. Pemberdayaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

### Sasaran 3 : Meningkatnya Pendapatan Pembudidaya

Sasaran "*Meningkatnya Pendapatan Pembudidaya*" bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya. Adapun cara mengukur persentase pengolah yang meningkat pendapatannya adalah jumlah pengolah yang meningkat pendapatannya dibagi jumlah keseluruhan pengolah dikalikan 100 persen, seperti rumus dibawah ini :

$$\frac{\text{Jumlah pembudidaya yang meningkat pendapatannya}}{\text{Jumlah pembudidaya keseluruhan}} \times 100\%$$

Untuk mengukur "*Meningkatnya Pendapatan Pembudidaya* ", maka dilakukan survey oleh tim One Data Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu kepada pembudidaya baik keramba, kolam, ikan hias maupun Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Perikanan. Metode tersebut dilakukan dengan metode sampel pada lokasi berdasarkan zona yang sudah ditentukan yakni zona selatan, utara dan Kapuas. Jumlah sampel yang berhasil dari hasil survey yakni sebanyak 1.991 RTP (Rumah Tangga Perikanan) dari total 13.750 RTP sesuai data Validasi Nasional (VALNAS) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Sehingga didapatkan rata – rata pendapatan pembudidaya perikanan sebesar Rp. 532.261,00. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan jumlah pembudidaya yang meningkat pendapatannya diatas rata –rata sebanyak 1.474 orang/ RTP.

$$\frac{1.474 \text{ orang}}{13.750 \text{ orang}} \times 100\% = 10,72 \%$$

Maka persentase pembudidaya yang meningkat pendapatannya adalah jumlah pembudidaya yang meningkat pendapatannya (1.474 orang) dibagi jumlah keseluruhan pembudidaya (13.750 orang) dikalikan 100 persen adalah 10,72 %.

Tabel 3.9  
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran  
Meningkatnya Pendapatan Pembudidaya Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase pembudidaya yang meningkat pendapatannya	Persen	10	10,72	107,2 %
Capaian Kinerja sasaran Sangat Berhasil (107,2 %)					

Tabel 3.10  
Analisis Pencapaian Sasaran  
Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2016			2018			2019		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase pembudidaya yang meningkat pendapatannya	5	5	100 %	7	7	100 %	10	10,72	107,2 %

Tabel 3.11  
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran  
Dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2019	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Persentase pembudidaya yang meningkat pendapatannya	20	10.72	53,6 %

Capaian kinerja sasaran *Meningkatnya Pendapatan Pembudidaya* Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 sebesar 107,2 % dikategorikan "Sangat berhasil". Capaian *Meningkatnya Pendapatan Pembudidaya* dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi kinerja *Meningkatnya Pendapatan Pembudidaya* Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 mencapai 10.72 % atau sebesar 107,2 %. Realisasi kinerja tahun 2019 tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 10 %.

Realisasi kinerja indikator Persentase pembudidaya yang meningkat pendapatannya tahun 2019 sebesar 10,72 % jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 7 %, maka realisasi tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 3.72 %.

Realisasi kinerja indikator Persentase pembudidaya yang meningkat pendapatannya tahun 2019 sebesar 10,72 % jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 20 % , maka tingkat kemajuan indikator Persentase pembudidaya yang meningkat pendapatannya mencapai 53,6 %.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase pembudidaya yang meningkat pendapatannya adalah sebagai berikut :

1. Hasil survey satu data (one data) yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan penyuluh di 23 Kecamatan dengan estimasi sebesar 24,437 Ton per Desember 2019 produksi perikanan budidaya;
2. Terlaksananya pengembangan kawasan budidaya dengan sistem minapadi tahun 2019. Pembangunan minapadi ditargetkan 1 Ha, realisasi di tahun 2019 seluas 3,5 Ha. Adapun lokasi yang dibangun sistem minapadi antara lain :
  - a. Pokdakan Tani Usaha Tani Desa Suka Maju Kecamatan Mentebah seluas 1 Ha dengan jumlah ikan yang ditebar sebanyak 10.000 ekor Ikan Nila,
  - b. Pokdakan Setia Usaha Desa Pamawan Kecamatan Boyan Tanjung seluas 0,5 Ha dengan jumlah ikan yang ditebar sebanyak 7.000 ekor Ikan Nila
  - c. Pokdakan Kasturi Desa Tani Makmur Kecamatan Hulu Gurung 1 Ha dengan jumlah ikan yang ditebar sebanyak 10.000 ekor Ikan Nila
  - d. Pokdakan Sungai Imbau Desa Mawan Kecamatan Pengkadan 1 Ha dengan jumlah ikan yang ditebar sebanyak 10.000 ekor Ikan Nila
3. Terlaksananya kegiatan sarana dan prasarana produksi budidaya dengan tersalurkannya bantuan benih ikan konsumsi dan Ikan hias kepada pokdakan :
  - a. Jumlah Pokdakan yang mendapat bantuan benih ikan konsumsi sebanyak 29 pokdakan dengan jumlah benih 967.000. ekor
  - b. Jumlah Pokdakan yang mendapat bantuan calon induk ikan arwana (*Scleropages formosus*) sebanyak 26 pokdakan dengan jumlah bantuan calon induk arwana 215 ekor calon induk arwana



4. Terlaksananya Pengembanagan kawasan budidaya dengan terbangunnya sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya :
  - a. Terealisasinya pembuatan kolam percontohan dan pagar pokdakan Salad Bersatu Desa Nanga Suhaid Kecamatan Suhaid sebanyak 2 kolam dengan luas 360 M<sup>2</sup> dan sepanjang pagar 116 meter
  - b. Terealisasinya pembuatan kolam percontohan Bukit Imbau Desa Mawan Kecamatan Pengkadan 7 kolam dengan luas 900 M<sup>2</sup>
  - c. Terealisasinya pembangunan sarana dan prasarana bioflok Islamic Center Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau selatan (rumah pakan, Instalasi air keluar, drainase yumina dan pembuatan pagar kompleks budidaya bioflok ismaic center )
  - d. Terelaisasinya pembuatan keramba jaring apung Mitra Perikanan Kecamatan Putusibau Utara sebanyak 1 paket
5. Terlaksanananya pengembangan kawasan budiddaya dengan sistem *Culture Based Fisheries* (CBF) tahun 2019. ditargetkan 1 Pokdakan yakni Pokdakan Uncak Sungai Ogang Desa Tuanas Muda Kecamatan Hulu Gurung dengan benih ikan biawan sebanyak 2.040 ekor, Jelawat sebanyak 1.000 ekor dan Ikan Gurami 6.054 ekor.
6. Hasil monitoring dan pembinaan juga dilakukan pada daerah kawasan Budidaya keramba, kolam yang tersebar di Kapuas Hulu. Kegiatan tersebut dilakukan dengan penyuluhan cara pembenihan ikan yang baik, penanganan hama dan penyakit serta sistem panen dan pasca panen. Sebanyak 2.500 kolam yang tersebar di Kapuas Hulu dengan capaian 10.275,40 Ton (Triwulan III) dan Keramba 6.100 keramba dengan capaian produksi 20.189,60 Ton (Triwulan III). Selain ikan konsumsi juga dilakukan pembudidaya ikan hias seperti ikan arwana di 1.200 kolam pada 23 Kecamatan sebanyak 2.500 ekor/tahun (Red Arwana) dan 5.000 ekor/tahun (Arwana Brazil).

Pencapaian Persentase pembudidaya yang meningkat pendapatannyatentunya masih terdapat beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa kendala tersebut antara lain :

1. Masih terbatasnya prasarana & sarana perikanan budidaya yang menunjang produksi budidaya perikanan,
2. Produksibenih yang belum optimal dan kualitas benih ikan yang dihasilkan, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan manajemen pengelolaan induk serta peranan UPTD dan UPR dalam penyediaan induk/benih ;
3. Ketersediaan benih masih terbatas;
4. Permodalanbagi pelaku produksi perikanan;
5. Investasiterhadap usaha perikanan budidaya manih minim;
6. Harga pakan masih cukup tinggi; serta

7. Kurangnya jaminan pemasaran dan harga produksi budidaya.

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka meningkatnya pendapatan pembudidaya Kabupaten Kapuas Hulu di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya guna mendukung produksi budidaya bagi pelaku perikanan.
2. Untuk mengatasi permasalahan tingginya harga pakan, maka perlu dilakukan; (i) pengembangan teknologi inovatif untuk pakan alternative dan buatan mandiri; harapan pembudidaya dapat menekan harga lebih murah dari pada pakan pabrik; (ii) pengawasan pengadaan dan peredaran pakan/bahan baku pakan.
3. Optimalisasi unit pengolahan ikan pada sentra-sentra produksi perikanan budidaya yang sudah ada.
4. Optimalisasi fungsi dan peran fasilitas pembenihan di UPTD dalam mendukung produksi induk unggul guna mencapai pemenuhan benih berkualitas.
5. Sertifikasi Cara Berbudidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dalam rangka memenuhi ketentuan keamanan pangan.
6. Pengembangan kawasan perikanan budidaya.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran 4 antara lain :

1. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Kegiatan :

- a. Peningkatan Sarana Produksi Perikanan Budidaya
- b. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar

2. Program Peningkatan Produksi Benih dan Pakan Ikan UPR/UP2R dan Pembudidaya

Kegiatan :

- a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat

3. Program Pengembangan dan Pengelolaan UPT Benih Ikan Kelansin

Kegiatan :

- a. Pengelolaan Operasional UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin
- b. Pengembangan Produksi UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin
- c. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin



Sasaran 4 : Meningkatnya Pendapatan Para Pengolah

Sasaran "*Meningkatnya Pendapatan Para Pengolah*" bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pengolah. Adapun cara mengukur persentase pengolah yang meningkat pendapatannya adalah jumlah pengolah yang meningkat pendapatannya dibagi jumlah keseluruhan pengolah dikalikan 100 persen, seperti rumus dibawah ini :

$$\frac{\text{Jumlah pengolah yang meningkat pendapatannya}}{\text{Jumlah keseluruhan pengolah}} \times 100 \%$$

Untuk mengukur "*Meningkatnya Pendapatan Pengolah*", maka dilakukan survey oleh tim One Data Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu kepada pengolah hasil perikanan. Metode tersebut dilakukan dengan metode sampel pada lokasi berdasarkan zona yang sudah ditentukan yakni zona selatan, utara dan Kapuas. Jumlah sampel yang berhasil dari hasil survey yakni sebanyak 398 RTP (Rumah Tangga Perikanan) dari total 750 RTP sesuai data Validasi Nasional (VALNAS) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Sehingga didapatkan rata – rata pendapatan pengolah perikanan. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan jumlah pengolah yang meningkat pendapatannya diatas rata –rata sebanyak 143 orang/ RTP.

$$\frac{143 \text{ orang}}{750 \text{ orang}} \times 100\% = 19,07 \%$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 750 orang keseluruhan pengolah terdapat 143 orang/RTP yang pendapatannya di atas rata-rata Rp. 1.490.000;/ bulan pendapatan pengolah. Maka porsentase pengolah yang meningkat pendapatannya adalah jumlah pengolah yang meningkat pendapatannya (143 orang) dibagi jumlah keseluruhan pengolah (750) dikalikan 100 persen adalah 19,07 %.

Tabel 3.12  
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran  
Meningkatnya Pendapatan Para Pengolah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase pengolah yang meningkat pendapatannya	Persen	3	19.07	635,67 %
Capaian Kinerja sasaran Sangat Berhasil (635,67 %)					

Tabel 3.13  
Analisis Pencapaian Sasaran  
Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2016			2018			2019		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase pengolah yang meningkat pendapatannya	1	1	100 %	2	2	100 %	3	19,07	635,67 %

Tabel 3.14  
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran  
Dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2019	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Persentase pengolah yang meningkat pendapatannya	5	3	60 %

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pendapatan para pengolah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 sebesar 19,07 % dikategorikan "Sangat berhasil". Capaian persentase pengolah yang meningkat pendapatannya di tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi kinerja persentase pengolah yang meningkat pendapatannya tahun 2019 mencapai 19,07 % atau sebesar 635.67 %. Realisasi kinerja tahun 2019 tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 16,07 %.

Realisasi kinerja indikator persentase pengolah yang meningkat pendapatannya tahun 2019 sebesar 19,07 % jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 2 %, maka realisasi tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 17,07 %.

Realisasi kinerja indikator persentase pengolah yang meningkat pendapatannya tahun 2019 sebesar 19,07 % jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 5 % , maka tingkat kemajuan indikator persentase pengolah yang meningkat pendapatannya tahun 2019 mencapai 381.4 %.

Realisasi kinerja indikator persentase pengolah yang meningkat pendapatannya tahun 2019 sebesar 19,07 % merupakan indikator yang tidak dilanjutkan pada tahun 2019 hingga akhir Renstra. Hal ini dikarenakan Dinas Perikanan memiliki program utama lainnya yang mendukung Visi dan Misi Bupati Kapuas Hulu hingga tahun 2021.

Adapun beberapa faktor pendukung pencapaian indikator persentase pengolah yang meningkat pendapatannya adalah sebagai berikut :

1. Beberapa kegiatan terkait meningkatnya minat masyarakat dalam mengonsumsi ikan, di antaranya pada tahun 2018 telah dilakukannya Kampanye Gemar Makan Ikan yang diikuti 1.000 anak Sekolah Dasar yang dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2018, dengan diadakannya kegiatan tersebut pemahaman anak sejak dini mengenai pentingnya mengonsumsi ikan dapat dibentuk.
2. Faktor produksi perikanan yang maksudnya dan ketersediaan ikan yang ada, yang salah satunya pada hasil pembudidayaan ikan, terdapat pada Kecamatan-Kecamatan potensi, walau pun untuk itu tidak terjadi pada Ibu Kota untuk ikan komoditas spesifik lokal.
3. Faktor pendukung lainnya karena pada tahun 2019 Dinas Perikanan melalui bidang Kelembagaan dan Pengelolaan TPI melakukan kegiatan Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Hasil Perikanan.
4. Pada tahun 2019 juga Dinas Perikanan aktif melakukan pendampingan kepada kelompok, baik itu kelompok yang telah kita latih lewat pelatihan ataupun tidak. Pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan meliputi bagaimana penyusunan analisa usaha, penguatan kelembagaan, desain serta bagaimana cara pemasaran produk.

Pencapaian persentase pengolah yang meningkat pendapatannya tentunya masih terdapat beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa kendala tersebut antara lain :

1. Distribusi, transportasi dan pemasaran ikan terutama dari daerah-daerah yang jauh seperti sungai dan danau masih mengalami kendala.
2. Inovasi dalam hal promosi dan sosialisasi produk-produk perikanan serta teknik pengolahannya belum berkembang pesat.
3. Lemahnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Produk pengolah yang ada di Kapuas Hulu masih lemahnya dari segi jaminan mutu dan keamanan hasil produk, karena produk yang ada masih sangat sederhana baik itu dari segi bentuk maupun kemasan.
4. Tingginya tingkat kehilangan mencapai sekitar 27,8% untuk mendapatkan hasil/produk yang bermutu baik, maka sangat diperlukan bahan baku yang bermutu baik pula. Hal ini menjadi tuntutan dan sangat mutlak bagi konsumen.
5. Terbatasnya sarana penanganan ikan ditingkat nelayan, pembudidaya, pengumpul dan pengolah sehingga bahan baku ikan menjadi kurang berkualitas.
6. Tidak stabilnya bahan baku ikan untuk pengolahan ini disebabkan oleh tidak stabilnya hasil tangkapan oleh nelayan dan hasil dari pembudidaya serta mahalnnya bahan baku tepung tapioka ditingkat pengolah.

7. Jenis ragam produk dan pengembangan produk bernilai tambah belum berkembang optimal dan belum populer meskipun Dinas Perikanan sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Hasil Perikanan.

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka persentase pengolah yang meningkat pendapatannya Kabupaten Kapuas Hulu di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyiapan sarana transportasi yang memadai untuk mendukung distribusi pemasaran yang akan membantu sebaran produk-produk perikanan hingga mudah di dapat.
2. Perlu dilakukan beragam inovasi-inovasi terbaru dalam menarik masyarakat dalam arti pentingnya mengonsumsi ikan.
3. Meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan dengan cara selalu melakukan pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan (Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, Industri, Perdagangan).
4. Meningkatkan produktifitas pengolahan hasil perikanan yang ramah lingkungan.
5. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
6. Mempermudah ketersediaan bahan baku ikan bagi pengolah, hal ini sedang diupayakan oleh Dinas Perikanan melalui program Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 4 meningkatnya pendapatan para pengolah antara lain :

1. Program Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah (SLID)  
Kegiatan :
  - a. Implementasi Sistem Logistik Ikan Daerah(SLID)
  - b. Pengembangan dan Pengelolaan TPI
  - c. Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI
2. Program Penguatan Daya Saing Produk Perikanan  
Kegiatan :
  - a. Peningkatan kualitas BimTek/Pelatihan
  - b. Peningkatan kapasitas kompetensi teknis dan usaha pengolah hasil perikanan (Inkubasi)
  - c. Peningkatan kapasitas Operasional Usaha (pasca inkubasi)
  - d. Promosi Hasil Perikanan

## B. REALISASI ANGGARAN

### 1. Pengelolaan Belanja Dinas

Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang Keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan Keuangan publik yang transparan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas publik dengan mendasarkan pada '*value for money*'. Disamping itu pengelolaan belanja daerah juga didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dimana belanja daerah harus berorientasi pada kinerja yang harus dicapai. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung belanja daerah juga harus berorientasi pada kepentingan publik.

### 2. Target dan Realisasi Belanja

Target dan realisasi Pendapatan selama Tahun 2019 sebagaimana tercantum Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2016, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.15  
Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu  
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Target	Realisasi	%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 3,124,481,000	Rp 2,933,645,961	93.89
1	Gaji dan Tunjangan	Rp 2,252,508,000	Rp 2,114,748,811	93.88
2	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 871,973,000	Rp 818,897,150	93.91
B	BELANJA LANGSUNG	Rp 14,737,053,400	Rp 14,371,627,682	97.52
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 5,800,000	Rp 4,750,000	81.90
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp 106,200,000	Rp 93,883,716	88.40
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Rp 6,000,000	Rp 5,823,700	97.06
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 115,080,000	Rp 107,455,000	93.37
	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Rp 86,876,200	Rp 86,849,500	99.97
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 4,500,000	Rp 4,498,500	99.97
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 41,017,900	Rp 41,017,900	100.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 18,500,000	Rp 18,491,953	99.96
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 13,570,000	Rp 13,568,000	99.99
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 33,600,000	Rp 31,600,000	94.05
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Rp 2,520,000	Rp 2,102,000	83.41
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 7,700,000	Rp 7,445,000	96.69
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 113,500,000	Rp 113,482,842	99.98
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 537,138,000	Rp 537,014,107	99.98
	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp 93,715,000	Rp 93,685,000	99.97

	Penyediaan Adminitrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	106,739,500	Rp	105,858,900	99.18
	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan OPD	Rp	42,070,000	Rp	39,809,000	94.63
	Penyusunan RKA dan DPA	Rp	16,215,000	Rp	16,215,000	100.00
	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Rp	456,185,000	Rp	416,234,700	91.24
	Penyediaan Jasa Publikasi	Rp	12,000,000	Rp	11,750,000	97.92
	Pembuatan Website skpd	Rp	15,000,000	Rp	15,000,000	100.00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
	Pengadaan Kendaraan Dinas	Rp	77,500,000	Rp	77,400,000	99.87
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp	84,850,000	Rp	84,244,560	99.29
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp	98,015,640	Rp	91,838,004	93.70
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	6,635,000	Rp	6,137,000	92.49
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp	12,165,000	Rp	12,165,000	100.00
	Penyusunan Jurnal dan Buku Besar Dinas Perikanan	Rp	9,840,000	Rp	9,840,000	100.00
	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Rp	57,775,700	Rp	55,611,700	96.25
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perikanan	Rp	238,508,160	Rp	231,791,515	97.18
	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	Rp	5,390,000	Rp	5,390,000	100.00
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	Rp	2,521,000	Rp	2,461,000	97.62
	Pengembangan Data dan Informasi Perikanan	Rp	146,762,300	Rp	144,915,407	98.74
	Fasilitasi Kerjasama Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu	Rp	67,750,500	Rp	67,572,882	98.74
5	Pengembangan Budidaya Perikanan					
	Peningkatan Sarana Produksi Perikanan Budidaya	Rp.	4.394.283.800	Rp	4,286,841,600	97.55
	Pengembangan Kawasan Budidaya air tawar	Rp	1,104,342,200	Rp	1,102,229,700	99.81
6	Pengembangan UPR/UP2R dan Pembudidaya					
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat	Rp.	160.770.500	Rp	145,772,640	90.67
7	Pengembangan UPT BI Ikan Kelasin	Rp	690,382,000	Rp	685,497,300	99.29
	Pengelolaan Operasional UPT BI Kelasin	Rp	421,240,000	Rp	409,490,150	97.21
	Pengembangan produksi UPT BI Kelasin	Rp	199,250,000	Rp	195,690,000	98.21
	Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT BI Kelasin					
8	Pengembangan Perikanan Tangkap					
	Pemulihan Sumber Daya Ikan	Rp	414,124,000	Rp	409,837,000	98.96
	Pemberdayaan ekonomi nelayan kecil	Rp	145,204,000	Rp	138,415,000	95.32
	Pengelolaan Perikanan Tangkap Berbasis CBF	Rp	112,534,000	Rp	94,030,000	83.56
	Perlindungan Nelayan Kecil	Rp	48,868,000	Rp	42,886,000	87.76
	Peningkatan sarana dan Prasarana pengelola perikanan Tangkap	Rp	1,100,108,000	Rp	1,066,496,000	96.94
9	Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah (SLID)					
	Implementasi Sistem Logistik Ikan Daerah	Rp	99,200,000	Rp	96,210,000	96.99
	Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	Rp	362,290,000	Rp	353,541,611	97.59
	Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI	Rp	1,713,418,000	Rp	1,704,223,915	99.46



10	Penguatan Daya Saing				
	Peningkatan kualitas Bimtek dan Pelatihan	Rp	85,237,000	Rp	84,087,411
		Rp	151,016,000	Rp	150,466,000
	Peningkatan Kapasitas kompetensi Teknis dan Usaha pengolah hasil perikanan (tahap inkubasi)	Rp	131,617,000	Rp	131,568,950
	Peningkatan Kapasitas Operasional Usaha (Pasca Inkubasi)	Rp	306,674,000	Rp	279,958,084
	Promosi hasil perikanan				
11	Pelestarian dan Pengendalian Pengelolaan PUD				
	Domestikasi Penangkaran dan Budidaya Spesies Ikan Endemik berpotensi Langka/Punah	Rp	212,060,000	Rp	203,168,000
	Optimalisasi Gerakan Penyelamatan Danau	Rp	-	Rp	-
	Penyusunan Raperda/Perda Pengelolaan dan Pengendalian Perairan Umum Daratan (PUD)	Rp	-	Rp	-
	Pemberdayaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Rp	242,795,000	Rp	235,317,000
	TOTAL BELANJA	Rp	17,861,534,400	Rp	17,305,273,643

Sumber : Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK-O) Dinas Perikanan tahun 2019

### 3. Analisis Penggunaan Sumberdaya Keuangan

Analisis penggunaan sumberdaya keuangan terhadap capaian kinerja dapat diukur dengan menghitung selisih capaian kinerja terhadap capaian anggaran. Sehingga tingkat efisiensi dari perbandingan realisasi capaian kinerja dengan capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.16  
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran  
Tahun Anggaran 2019

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitabel kinerja Dinas	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	100 %	Rp. 2.641.639.900	Rp. 2.555.901.321	96,75 %	3.25 %
2	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Persentase nelayan yang meningkat pendapatannya	10 %	10.93 %	128,59 %	Rp. 2.275.993.000	Rp. 2.190.149.00	96,24 %	32,35 %
3	Meningkatnya Pendapatan Pembudidaya	Persentase pembudidaya yang meningkat pendapatannya	10 %	10,72 %	107,2 %	Rp. 6.970.268.500	Rp. 6.825.521.390	97,92 %	9.53 %
4	Meningkatnya pendapatan para pengolah	Persentase pengolah yang meningkat pendapatannya	3 %	19,07 %	635,67 %	Rp. 2.849.452.000	Rp. 2.800.055.971	98,27 %	537.4 %

Sasaran meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitabel kinerja Dinas jika dibandingkan dari capaian kinerja B (100 %) dengan anggaran sebesar Rp. 2.641.639.900 (96,75 %) dapat meningkatkan efisiensi anggaran sebesar 3,25 %. Sasaran meningkatnya pendapatan nelayan jika dibandingkan dari capaian kinerja 10,93% (128,59%) dengan anggaran sebesar Rp. 2.275.993.000 (96,24%) dapat meningkatkan efisiensi anggaran sebesar 32,35 %. Sasaran meningkatnya pendapatan pembudidaya jika dibandingkan dari capaian kinerja 10,72% (107,2%) dengan anggaran sebesar Rp. 6.970.268.500 (97,92%) dapat meningkatkan efisiensi anggaran sebesar 9,53 %. Sasaran meningkatnya pendapatan para pengolah jika dibandingkan dari capaian kinerja 19,07% (635,67%) dengan anggaran sebesar Rp. 2.849.452.000 (98,27%) dapat meningkatkan efisiensi anggaran sebesar 537,4 %.



## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. KESIMPULAN

Sebagai bagian penutup dari LKIP Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2019 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi, dengan predikat "Sangat Berhasil", hal ini ditandai dari lima sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu telah mencapai target dan sasaran target yang telah ditetapkan pada Renstra. Dengan demikian, pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu yang mengacu pada Rencana Strategis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Renstra telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan Visi dan Misinya.

Secara Global hasil pembangunan perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 ditinjau dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis seluruh capaian kinerja, maka pada tahun 2019 Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan capaian kualitatif sebesar 242,86 % dari sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu untuk terus meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu dimasa yang akan datang terutama halnya dalam sektor perikanan umum.

#### B. HAMBATAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Capaian tersebut di atas dirasa belum optimal, namun secara bertahap mengalami perbaikan dan peningkatan walaupun belum secara signifikan baik pelaksanaan program dan kegiatan maupun dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, hal ini disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya :

1. Sumber Daya Aparatur dan Pelaku Perikanan meliputi :
  - a. Keterbatasan Tenaga terutama tenaga penyuluh dilapangan
  - b. Keterbatasan Kemampuan Sumber Daya Aparatur yang belum Optimal
  - c. Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan Kelompok Pembudidaya Ikan, Nelayan serta Kelompok Pengolah Hasil Perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan
  - d. Inovasi untuk meningkatkan produksi masih dirasakan kurang.

2. Dukungan Sarana meliputi :
  - a. Sarana Mobilitas perlu ditingkatkan secara kuantitas
3. Dukungan Permodalan dan Pemasaran Hasil Perikanan:
  - a. Keterbatasan kemampuan permodalan petani Nelayan untuk mengembangkan usahanya.
  - b. Terbatasnya kegiatan pemasaran dan distribusi/pengangkutan hasil-hasil perikanan.
  - c. Masih belum optimal promosi atau terekspos produk perikanan baik produk budidaya maupun olahan.

Luasnya sebaran perairan umum yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dengan daya jangkau masih yang cukup sulit dan memerlukan alokasi dana yang cukup besar masih menjadi kendala secara teknis serta kuantitas dan kualitas SDM guna mendukung memenuhi luasnya sebaran. Guna mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan Perencanaan kegiatan lebih terarah serta tepat guna dalam menyusun Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian anggaran yang berbasis kinerja dengan tolak ukur Renstra dan standar analisa belanja serta dilengkapi peningkatan standar pelayanan minimal.
2. Membangun, merehabilitasi serta mengoptimalisasi sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap, budidaya maupun pemasaran hasil usaha perikanan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Pemanfaatan bahan baku pakan alternatif yang murah dan mudah didapat.
4. Terus meningkatkan pemberdayaan pelaku pembudidaya ikan serta nelayan melalui pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan keterampilan, penguasaan teknologi serta pengembangan kelembagaan
5. Sektor perikanan harus berorientasi pada ekspor, baik secara lokal, maupun secara nasional, hal dapat didukung melalui industrialisasi melalui komoditas utama yang ada Di Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam pengelolaannya, pola kemitraan antara industri, pemerintah dan masyarakat harus terjalin. Melalui industrialisasi, akan memberikan benih dan material lainnya untuk kemudian di budidayakan. Pemerintah juga harus berperan sebagai pembuat regulasi diantaranya dalam pengendalian harga sehingga tetap bisa bersaing di pasar luar.
6. Menambah Jumlah Pegawai di Dinas Perikanan melalui penambahan Formasi di Penerimaan CPNS Daerah, ataupun melalui penambahan tenaga kontrak untuk bidang perikanan.

7. Peningkatan kualitas sumberdaya kelembagaan serta pranata sosial di kalangan masyarakat pengelola sumberdaya ikan sehingga akses sumberdaya modal akan semakin dekat dan kuat.
8. Membangun kapasitas kelembagaan yang handal untuk mendukung kegiatan perencanaan eksplorasi dan eksploitasi serta pelestarian sumberdaya kelautan dan pengembangan basis data.
9. Terus Meningkatkan kegiatan promosi produk perikanan di berbagai kesempatan Pameran dengan harapan adanya kerjasama pemasaran atau investasi kesektor perikanan

Keberhasilan pembangunan Perikanan bergantung pada partisipasi seluruh *stakeholders* perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, maka faktor kerjasama dan koordinasi diperlukan sedini mungkin yaitu sejak tahap perencanaan yang terus dikembangkan secara serasi pada tahap pelaksanaan serta pengawasan selain itu pembangunan perikanan juga tergantung dari sistem pelaksanaan pembangunan yang *bottom up* dengan senantiasa mempertimbangkan aspirasi dari bawah utamanya pembudidaya ikan dan nelayan sebagai obyek pembangunan perikanan kabupaten Kapuas Hulu.

Akhirnya saran dan masukan dari pihak terkait sangat kami harapkan guna penyempurnaan LAKIP ini.

Putussibau, 22 Februari 2019

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Kapuas Hulu,

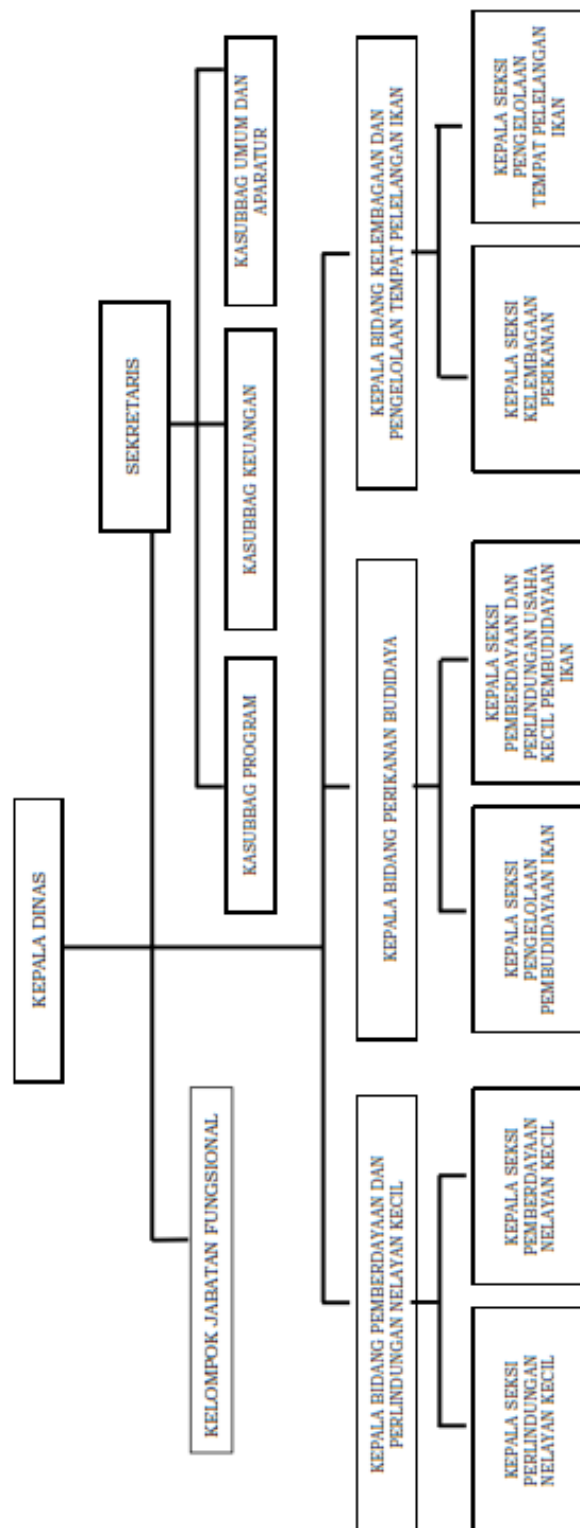


RONI JANUARDI, S. Sos., M. Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 19650129 198603 1 009

Lampiran 1 : Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

Peraturan Bupati Kapuas Hulu  
Nomor : 63 Tahun 2016  
Tanggal : 7 November 2016





## Lampiran 2 : Galeri Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019

### A. Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja



Pelayanan Publik Dinas Perikanan



Rapat Koordinasi dan Evaluasi dalam rangka peningkatan SAKIP Dinas Perikanan



B. Sasaran 2 : Meningkatnya Pendapatan Nelayan



Penandatanganan kerjasama CBF dg Desa Kalis Raya dan Sosialisasi Suaka Perikanan



Pelatihan pengolahan ikan utk istri nelayan

Sosialisasi kartu KUSUKA



Panen Raya di Danau Lindung

Retoking Ikan Arwana



### C. Sasaran 3 : Meningkatnya Pendapatan Pembudidaya



Panen ikan nila yang dibudidayakan dengan sistem minapadi



Kelompok binaan dari bantuan DAK/ DAU yang sudah melakukan pemanenan



UPTD Benih Ikan sebagai penyedia benih berkualitas di Kapuas Hulu



D. Sasaran 4 : Meningkatnya Pendapatan Pengolah



Pameran pada Festival Danau Sentarum



Pelatihan Disversifikasi Produk Olahan Ikan



Juara 1 Lomba Masak Tingkat Provinsi



Koordinasi pengelolaan TPI ke UGM



Rapat evaluasi petugas TPI



TPI Jongkong yang terus beraktivitas



### Lampiran 3 : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019



#### PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS PERIKANAN

Jalan Antasari Nomor 6 Kode Pos : 78711  
Telp.(0567) 21644 Fax. (0567) 21644

#### PAKTA INTEGRITAS

Saya, RONI JANUARDI, S.Sos., M.Si, Kepala Dinas Perikanan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perikanan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Putussibau, 28 Januari 2019

Menyaksikan :  
BUPATI KAPUAS HULU,  
  
A.M. NASIR, SH.

KEPALA DINAS PERIKANAN  
  
RONI JANUARDI, S.Sos., M.Si  
NIP.19650129 198603 1 009



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 DINAS PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RONI JANUARDI, S.Sos.,M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : A.M. NASIR, SH

Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 5 September 2019

Pihak Kedua  
BUPATI KAPUAS HULU,  
  
A.M. NASIR, SH

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU,  
  
RONI JANUARDI, S.Sos., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650129 198603 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
KEPALA DINAS PERIKANAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitabel kinerja Dinas	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	8
2	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Persentase nelayan yang meningkat pendapatannya	8,5
3	Meningkatnya Pendapatan Pembudidaya	Persentase pembudidaya yang meningkat pendapatannya	10
4	Meningkatnya pendapatan para pengolah	Persentase pengolah yang meningkat pendapatannya	3

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1,833,926,600.00	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 162,350,000.00	APBD
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 98,015,640.00	APBD
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 547,347,660.00	APBD
5	Peningkatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Rp 1,820,838,000.00	APBD (DAK)
6	Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Rp 5,498,626,000.00	APBD (DAK)
7	Program Peningkatan Produksi Benih dan Pakan Ikan UPR/UP2R dan Pembudidaya	Rp 160,770,500.00	APBD
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan UPT Benih Ikan Kelansin	Rp 1,310,872,000.00	APBD
9	Program Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah	Rp 2,174,908,000.00	APBD
10	Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Rp 674,544,000.00	APBD
11	Program Pelestarian dan Pengendalian Pengelolaan Perairan Umum Daratan (PUD)	Rp 454,855,000.00	APBD
JUMLAH		Rp 14,737,053,400.00	

